

KERJASAMA PERTAHANAN INDIA – RRT DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN KEDUA NEGARA

Samsul Huda¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This research contains an analysis of India's interests in defense cooperation with China regarding border issues. Interest analysis by looking at the articles or articles contained in the cooperation agreement between India and China. Writing this research using literature from various sources and media. The method used in this paper is descriptive qualitative analysis.

India's interest in defense cooperation with China regarding border issues is to achieve border security and overcome the problem of smuggling or smuggling. This interest analysis uses the framework of various concepts, namely neorealism, the concept of bilateral relations, the concept of security, national interests and security cooperation.

Keywords: *Defense Cooperation, Borders, India, China, Confidence Building Measures*

ABSTRAK

Penelitian ini berisi tentang analisa kepentingan India dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok terkait persoalan di perbatasan. Analisa kepentingan dengan melihat artikel atau pasal yang terdapat dalam perjanjian kerjasama India dan Tiongkok. Penulisan penelitian ini menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber dan media. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif analisis deskriptif.

Kepentingan India dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok terkait persoalan di perbatasan adalah demi mencapai keamanan di perbatasan dan mengatasi persoalan penyelundupan atau smuggling. Analisa kepentingan ini menggunakan kerangka pemikiran dari berbagai konsep, yakni neorealisme, konsep hubungan bilateral, konsep keamanan, kepentingan nasional dan kerjasama keamanan.

Kata Kunci: *Kerjasama Pertahanan, Perbatasan, India, China, Confidence Building Measures*

PENDAHULUAN

India dan China merupakan dua negara yang mempresentasikan dua kekuatan besar Asia yang terus tumbuh berkembang serta bersaing di dunia internasional. Kedua negara selalu berupaya membuktikan kehadirannya terutama dalam wilayah kawasan dengan menunjukkan peran sebagai kekuatan besar dan utama dimasa yang disebut sebagai Abad Asia. China merupakan wilayah yang sebagian besar terletak pada kawasan Asia Timur sedangkan India berada di dalam wilayah kawasan Asia Selatan. Walaupun terletak dalam dua wilayah kawasan yang berbeda, India dan China memiliki perbatasan yang mempertemukan kedua pihak secara langsung. Perbatasan antara China dan India memiliki bentangan panjang lebih dari 3.440 kilometer, di mana dengan bentangan tersebut kedua negara memiliki perspektif yang berbeda terhadap wilayah perbatasan (Natarajan). Hal ini kemudian mengarah kepada klaim yang saling bertabrakan antar India dan China yang menyebabkan konflik antar kedua pihak di wilayah perbatasan. Berbagai cara telah diupayakan untuk mengarahkan kedua negara menjalin hubungan yang lebih baik. Terlepas dari konflik yang berlangsung, India dan China merupakan dua negara yang terlahir sebagai raksasa ekonomi di masing-masing wilayah kawasan. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)

Namun demikian, India dan Tiongkok masih memiliki sejumlah persoalan bilateral, termasuk konflik di kawasan perbatasan. Bagaimanapun juga, batas yang jelas dengan negeri tetangga penting bagi setiap negara berdaulat. Persoalan di kawasan perbatasan yang masih belum tuntas hingga mendorong India dan Tiongkok menjalin kerjasama di perbatasan termasuk dalam bidang pertahanan.

Dinamika hubungan India dan Tiongkok dirangkum dalam empat fase yang dimulai sejak tahun 1949 hingga saat ini. Fase pertama adalah pada rentang waktu 1950 hingga 1960. Pada tahun 1949 India melakukan pengakuan terhadap RRC atau saat ini disebut Tiongkok namun kedua negara melakukan hubungan kerjasama pada tahun 1950 an. Pada fase ini keduanya memiliki hubungan yang baik hingga memunculkan istilah Hindi-Chini Bhai-Bhai atau India dan Tiongkok yang Bersaudara. Sikap saling mempercayai dan memahami di antara kedua negara berkembang pada saat itu dan didasarkan pada lima prinsip atau Panchsheel yang berasal dari perjanjian pembukaan hubungan dagang antara Tiongkok yang melingkupi wilayah Tibet dengan India. Perjanjian tersebut ditandatangani Dutabesar India Nedyam Raghavan dan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Chang Han Fu pada 29 April 1954 di Beijing. Kelima prinsip itu adalah sikap saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, tidak saling menyerang, tidak saling ikut mencampuri terhadap urusan dalam negeri, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai. (Sharma dan Ghildial, 2014).

Fase kedua adalah tahun 1960 hingga tahun 1962. Pada Fase ini mulai muncul persoalan perbatasan yang disebabkan keduanya memiliki perspektif yang berbeda mengenai batas negara. Puncak dari fase ini adalah konflik bersenjata selama 31 hari yang terjadi pada Oktober hingga November 1962. Konflik berakhir setelah Tiongkok secara sepihak menghentikan serangan. Fase selanjutnya dari 1962 hingga 1980. Ketegangan di antara kedua negara menurun, namun, masih dipenuhi rasa saling curiga terkait persoalan perbatasan. Kemudian, hubungan baik muncul kembali menyusul perpecahan Uni Soviet pada tahun 1991. Pembubaran Uni Soviet ini mengurangi pengaruh kubu komunis di Tiongkok. Pada fase ini hubungan perdagangan dan ekonomi secara umum kedua negara meningkat hingga tahun

2000.

Kedua negara ini masing-masing memiliki pandangan yang berbeda untuk garis perbatasan India dan Tiongkok. Tiongkok mengklaim bahwa tidak ada batas yang jelas disepanjang bukit Himalaya. Dengan begitu dibutuhkan garis batas yang jelas untuk memisahkan India dan Tiongkok. Sedangkan India mengklaim bahwa sudah adanya garis perbatasan yang jelas yang ditentukan sejak pemerintahan Inggris di India.

Penulis memilih masalah ini untuk dijadikan bahan penelitian karena persoalan perbatasan menjadi bagian yang vital bagi suatu negara. Perbatasan memiliki peran yang sangat krusial karena sebagai jalur dalam menjalin hubungan dengan negara luar. Batas suatu negara dengan negara lain akan menyediakan berbagai kesempatan dalam menjalin hubungan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya dengan negara lain.(Shreesh K.Pathak). Dengan begitu kerjasama India dan Tiongkok ini menjadi persoalan yang penting untuk dibahas karena berkaitan dengan perbatasan dengan kerjasama yang dilakukan secara terus menerus.

Penelitian ini merujuk pada perjanjian kerjasama di perbatasan India dan Tiongkok pada tahun 2013, karena perjanjian ini merupakan bentuk lanjutan dari kesepakatan atau perjanjian yang sebelumnya dibuat. Sehingga perjanjian ini terdiri dari poin-poin penting yang sebelumnya tercantum dalam perjanjian sebelumnya dan poin penting yang baru ditambahkan. Penulis akan menganalisa kepentingan India dalam melanjutkan untuk melakukan kerjasama keamanan di perbatasan dengan Tiongkok. Pada dasarnya kepentingan ini tidak hanya bertujuan pertahanan di perbatasan saja, melainkan kepentingan lain yakni kepentingan untuk memerangi permasalahan lintas batas seperti penyelundupan, terorisme dan perompakan di sekitar perairan Samudera Hindia.

Penulis mengambil sudut pandang India dalam melihat kepentingan dalam perjanjian ini adalah karena India memiliki kemampuan untuk berperan dalam tataran global dengan melakukan hubungan baik dengan negara tetangga.(Srinath Raghavan). Kemudian karena India berbatasan dengan beberapa negara yang selain memudahkan untuk melakukan hubungan kerjasama, memudahkan pula untuk masuknya ancaman dari negara lain. Dengan begitu, kerjasama keamanan perlu dilakukan dengan negara tetangga. Hal ini pun berlaku bagi India untuk melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki sejarah terkait persoalan perbatasan.

Perdana Menteri India Manmohan Singh mengatakan bahwa “*India will not be able to realize its own destiny without the partnership of its South Asian neighbours*”(Srinath Raghavan). Hal ini semakin menegaskan bagi India untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan baik dapat tercapai apabila keduanya menjalin rasa saling percaya dan menghilangkan rasa saling curiga. Kemudian konsep yang digunakan penulis adalah konsep keamanan yang merupakan tujuan utama India dalam menjalin kerjasama ini. Tujuan keamanan dapat tercapai dengan melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan karena hal ini berkaitan dengan pencapaian keamanan dan perdamaian di perbatasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah, diantaranya: Merujuk pada rumusan permasalahan tersebut maka perlu adanya pemikiran yang bersifat strategis tentang “**“Kerjasama Pertahanan India – RRT Dalam Pengelolaan Perbatasan Kedua Negara?”**”.

KERANGKA ANALITIK

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Neorealisme. Neorealisme atau realisme struktural merupakan sebuah pendekatan yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz tahun 1979 dalam bukunya *Theory of International Politics*. Neorealisme lahir sebagai perombakan dan penyempurnaan terhadap teori realisme yang dianggap kurang relevan dengan keadaan hubungan internasional saat ini. (Yulius P. Hermawan, 2008) Neorealisme tetap mempertahankan nilai realis bahwa hubungan internasional antar negara merupakan hubungan yang antagonistik dan konflikual. Hal yang membedakan neorealisme dan realisme dilihat dari aktor yang berperan di dalam sistem internasional.

Neorealisme muncul sebagai implikasi dari pengaruh globalisasi terhadap hubungan internasional. Globalisasi dengan berbagai variannya telah mengubah politik internasionalnya menjadi "*post-international politics*" dimana aktor non - negara mulai mengemuka sebagai aktor dominan selain aktor negara dengan kapasitas dan kapabilitas interaksi yang telah melebihi aktor negara. Secara sederhana, jika pada realisme aktor yang menjadi kunci utama dalam sistem internasional adalah negara bangsa (*nation - State*), maka pada neorealisme, aktornya adalah sistem itu sendiri, dimana sistem ini bertindak sebagai pendukung perilaku negara sehingga negara yang kebijakannya relevan dengan isu - isu yang ada akan bertahan.

Neorealisme menjelaskan tentang kepentingan nasional bahwa setiap negara menetapkan cara yang dipikirkannya terbaik untuk menjalankan kepentingannya. Menurut Waltz, kepentingan nasional bergerak seperti sinyal otomatis yang memerintahkan para pemimpin negara kapan dan kemana harus bergerak. Waltz menghipotesiskan bahwa para pemimpin negara secara otomatis akan selalu menjalankan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan oleh kepentingan negara. (Jackson dan Sorensen)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk menuliskan maupun untuk menggambarkan apa yang terlihat, dan apa yang dialami oleh peneliti sendiri selama proses penelitian. Dengan maksud untuk mengungkapkan, menelaah dan juga menganalisis permasalahan dengan menggambarkan peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam objek penelitian. (Moleong, Lexy J, 2015)

PEMBAHASAN

A. Dinamika Hubungan Keamanan Perbatasan India Dan China

Dinamika hubungan India dan Tiongkok tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terkadang menjadi hambatan dalam menjalin hubungan kerjasama. Hubungan keduanya dibayangi oleh sejarah, sehingga sejarah dapat membentuk kedua negara untuk melakukan kerjasama di masa depan. Hubungan India dan Tiongkok dipengaruhi oleh berbagai peristiwa. Tahun 1950 Tiongkok melakukan invasi ke Tibet, invasi ini disebabkan karena adanya kedekatan sejarah antara India dan Tibet, sehingga pada saat itu India

memiliki pengaruh di Tibet. Tahun 1959 Tibet melakukan perlawanan terhadap Tiongkok yang ketika itu masih berkuasa. Pasukan pembebasan rakyat Tiongkok atau PLA meningkatkan pemberontakan di ibukota Tibet, Lhasa. Akibat perlawanan Tiongkok, pada 30 Maret 1959 Dalai Lama melarikan diri dari Tibet ke India, kemudian India memberikan suaka kepada pemimpin Tibet tersebut. Tiongkok mengutuk perbuatan India terhadap Dalai Lama dan dianggap telah merusak isi dari perjanjian Panchshell pada tahun 1954 (Aldo D).

Peristiwa lain yang mempengaruhi hubungan India dan Tiongkok adalah pembuatan keputusan mengenai status Sikkim. Sikkim merupakan wilayah yang memiliki hubungan dekat secara budaya dengan Tibet dan wilayah ini dibawah pengawasan pemerintah Inggris sejak tahun 1888. Secara de facto Sikkim dimiliki Inggris dan secara de jure dimiliki Tibet. Untuk status Sikkim ini kemudian dilakukannya negosiasi.

Tahun 1890 dibuat perjanjian mengenai status Sikkim antara pemerintah Inggris dan Tiongkok (Alfred P. Rubin, 1960). Hasil perjanjian itu menunjukkan adanya batas jalur air Himalaya yang memisahkan Tibet dan Sikkim. Posisi pemerintah Inggris di Sikkim adalah sebagai negara perwalian dimana Pemerintah Inggris melakukan pengawasan terhadap Sikkim baik dalam urusan internal maupun dalam urusan eksternal. Setelah perjanjian tahun 1890, otoritas Sikkim masuk ke dalam wilayah Tibet.

Muncul permasalahan ketika Tiongkok tidak menyerahkan hak Sikkim kepada pemerintah Inggris. Tiongkok menunjukkan sikap tidak konsisiten dari perjanjian sebelumnya terhadap posisi Inggris di Sikkim. Hal ini memunculkan persoalan tidak hanya pada Pemerintah Inggris melainkan juga terhadap Pemerintah India pasca merdeka dari Inggris pada tahun 1947.

Pada tahun 1950, hubungan antara India dan Sikkim mengalami kemajuan yang dibuktikan dalam sebuah perjanjian yang berisi tentang pemberian hak otonomi kepada Sikkim untuk mengurus urusan dalam negeri sedangkan India bertanggung jawab dalam mengawasi pertahanan wilayah teritorial Sikkim.

A.1. Konflik Perbatasan 1962

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik yang terjadi antara India dan Tiongkok terkait permasalahan di perbatasan, terdapat dasar dari keduanya dalam mempertahankan klaim wilayah perbatasan masing-masing. Klaim yang dikeluarkan India berdasarkan pada (Yaacov Vertzberger, 1982).

1. Klaim yang dikeluarkan India ini berdasarkan keabsahan dari perjanjian yang tidak di ratifikasi oleh pemerintahan Tiongkok, seperti Perjanjian Simla pada tahun 1914 yang hanya diratifikasi oleh pemerintahn Tibet, dan perjanjian 1842 yang membahas tentang Ladakh yang ditandatangani oleh perwakilan dari Kerajaan Tiongkok namun tidak diratifikasi oleh Tiongkok

2. Klaim India pun berdasarkan pada sejarah yang kemudian membentuk prilaku dan nilai terkait persoalan perbatasan. Misalnya, India melakukan aktivitas dan deklarasi secara sepihak terkait kedaulatan wilayah yang disengketakan dan tidak diikuti oleh Tiongkok. Dalam sudut pandang India, alasan Tiongkok untuk tetap diam adalah terkait dengan pernyataan Nehru pada tahun 1950 mengenai status McMahon Line sebagai batas timur laut India, dan Tiongkok tidak menunjukkan ketidaksetujuannya mengenai hal ini pada pertemuan yang

dilakukan oleh Nehru dan Chou Enlai tahun 1954 dan 1956.

3. Klaim selanjutnya berdasarkan pada sejarah kepemilikan teritori atau pengakuan terhadap wilayah yang disengketakan.

4. Kemudian berkaitan dengan keadaan geografi di garis perbatasan. Keadaan ini dengan melihat secara fisik dari topografi dan garis perbatasan pun harus mengikuti bentuk tanahnya, seperti garis batas air dan batas pegunungan.

5. Klaim berdasarkan pada pengaruh dari perubahan rezim yang dapat saja membatalkan perjanjian. Namun, dalam sudut pandang India perubahan rezim tidak merubah pada keptusan perjanjian.

6. Klaim yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan pada saat penandatanganan dan dapat berubah pada saat yang lain.

Pemerintah India menggunakan perjanjian dan dokumen sebagai dasar untuk mendukung klaim perbatasan yang berada pada wilayah barat, tengah dan timur sebagai batas yang sah dan diakui. Persoalan perbedaan persepsi mengenai perbatasan dimulai pada tahun 1913-1914, dimana pada saat itu diadakannya Konferensi Simla yang dihadiri tiga negara yakni, delegasi Tibet, perwakilan dari Tiongkok dan sekretaris pemerintah Inggris yang berkuasa di India, Sir Henry McMahon. Pihak Inggris dan Tibet menandatangani perjanjian mengenai Garis McMahon atau McMahon Line, yakni garis batas negara yang memisahkan India dan Tibet. Meskipun secara wilayah, sebagian besar wilayah Tiongkok tidak berbatasan langsung dengan Garis McMahon, namun Tiongkok masih memiliki kekuasaan atas Tibet. Hal ini yang membuat Tiongkok menolak mengenai keputusan letak Garis McMahon tersebut. Secara resmi Inggris mencantumkan Garis McMahon pada bagian peta India pada tahun 1937 dan mempublikasikan pada tahun 1938. Selama masa Perang Dunia II, Inggris berusaha untuk memperluas daerah pengawasannya dengan mengklaim Garis McMahon. Pada 1947 India merdeka dan Garis McMahon menjadi batas timurlaut India.

Pada 20 Oktober 1962, Tiongkok meningkatkan kekuatan militer yang lebih ofensif dan hal ini merupakan titik awal terjadinya perang India dan Tiongkok. Kemudian Tiongkok menunda serangannya dan secara pribadi Zhou menemui Nehru untuk mengupayakan dilakukannya gencatan senjata dan penarikan pasukan dari wilayah yang disengketakan. Zhou masih berupaya untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan ini dan menghindari terjadinya perang dalam skala besar.

Namun, Nehru menolak upaya yang diajukan oleh Zhou. Setelah penolakan upaya tersebut, tiga minggu kemudian Tiongkok meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran dan hanya dalam waktu tiga hari pasukan Tiongkok berhasil mengalahkan pasukan militer India.

Perang berakhir pada 22 November 1962 dengan kemenangan di Tiongkok dan secara unilateral atau sepihak memutuskan untuk melakukan gencatan senjata di perbatasan yang disengketakan. Satu bulan kemudian, pasukan militer Tiongkok meninggalkan Garis McMahon sejauh 20 KM dibelakang garis tersebut (Navile Maxwell, 1999).

A.2. Wilayah Konflik India-China

Wilayah yang menjadi penyebab konflik antara India dan Tiongkok dibagi ke dalam tiga sektor wilayah yakni Barat, Timur dan Tengah. Total wilayah yang diperebutkan adalah 135.000 km² yang dibagi menjadi tiga bagian yakni, sektor barat sebesar 38.000 km² yang

akui oleh Tiongkok meliputi wilayah Aksai Chin, Leh dan Ladakh dan 5180 km² dibawah pengawasan Tiongkok meliputi Lembah Shakgam. Sektor tengah hanya 1820 km² meliputi wilayah Uttarakhand dan Himachal Pradesh dan sektor timur sebesar 90.000 km² dibagian wilayah Timur Laut India yakni Arunachal Pradesh.

A.3. Penyelesaian Konflik

Perang berlangsung selama 31 hari dan kemenangan diraih oleh Tiongkok dengan secara sepihak melakukan gencatan senjata. Setelah perang, keduanya tidak membahas permasalahan perbatasan, namun India masih menolak untuk melakukan negosiasi dengan Tiongkok dan hubungan keduanya membeku hingga akhir tahun 1970.90 Masalah perbatasan dianggap sebagai permasalahan yang sensitif sehingga keduanya memilih untuk tidak membahas persoalan ini.

Kedua negara mulai membuka hubungan diplomatik pada 1976 dan India mulai menunjukkan adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan dengan jalur negosiasi. Pada kunjungan Menteri Luar Negeri India ke Tiongkok pada 1979, Deng Xiaoping mengajukan rencana untuk kedua negara. Rencana tersebut adalah membagi wilayah klaim dimana untuk Tiongkok di Timur dan India di Barat. India kembali menolak pengajuan ini dan memaksa Tiongkok untuk menarik pasukannya dari wilayah yang diklaim India.

Setelah India dipimpin oleh Rajiv Gandhi, kebijakan mengenai perbatasan berubah drastis. India tidak lagi memaksa Tiongkok untuk menarik pasukannya dari wilayah klaim India. Pada 1981, Wakil PM dan menteri Luar Negeri Tiongkok, Huang Hua mengunjungi India dan hal ini menjadi awal keduanya untuk melakukan perundingan terkait persoalan di perbatasan. India mulai menunjukkan perubahan sikap untuk membawa permasalahan perbatasan kedalam forum negosiasi.

Tahun 1981 hingga 1987 sudah dilakukan delapan kali pertemuan pada tingkat menteri. Beberapa pertemuan ini tidak menemukan hasil dan antara 1986 dan 1987 terjadi ketegangan antara India dan Tiongkok di Lembah Sumdorong Chu. Persoalan ini menjadi hambatan bagi kedua negara untuk melakukan perundingan terkait persoalan di perbatasan. Penyelesaian permasalahan perbatasan dimulai kembali pada Desember 1988, dimana PM India Rajiv Gandhi mengunjungi Tiongkok. India mengajak Tiongkok untuk membentuk JWG atau Joint Working Group dan ini menjadi kerangka dasar untuk melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan di perbatasan kedua negara. Selama pertemuan berlangsung, keduanya menyepakati untuk pertukaran pengembangan akademik, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi.

A.4. Permasalahan Lain Terkait Perbatasan India-China

Persoalan yang muncul terkait lintas batas antara India dan Tiongkok adalah penyelundupan. Barang-barang yang dijadikan subjek penyelundupan seperti hewan liar, bagian dari tubuh hewan liar (tulang, belalai, dan kulit), dan obat-obatan terlarang serta barang-barang illegal lainnya. Penyelundupan ini terjadi di wilayah perbatasan timurlaut India yang berbatasan langsung dengan Myanmar dan Tiongkok.

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan perdagangan lintas batas. Sebanyak 12 jenis barang yang mengalami peningkatan pada tahun 2012 di wilayah Nathu La mengalami peningkatan sebanyak 23 persen dan di Shipki La meningkat sebanyak 380 persen dengan total

keuntungan mencapai 5.33 Rs atau setara dengan Rp 1.050,57. Namun, disisi lain terjadi peningkatan pula pada penyelundupan pada hewan ternak, obat-obatan dan narkotika di sepanjang perbatasan. Misalnya saja, di sepanjang perbatasan India-Banglades penyelundupan meningkat hingga 16234 Rs lakh atau setara dengan Rp 319.979.820.319,64 dibulatkan menjadi 319 miliar dalam rupiah. Pada tahun 2013 mencapai 10329 Rs Lakh atau setara dengan Rp 203.589.476.658,96 dibulatkan menjadi 203 miliar dalam rupiah. Di sepanjang perbatasan India-Nepal penyelundupan mencapai 10153 Rs lakh atau setara dengan Rp 200.120.433.393,20 dibulatkan menjadi 200 miliar dalam rupiah. Persoalan ini muncul menjadi fokus kedua negara yakni India dan Tiongkok karena akan mengganggu perekonomian dan merusak kelestarian hewan. Hewan yang dijadikan objek penyelundupan ini biasanya hewan langka yang satwanya sudah hampir punah. Penyelundupan ini bersifat illegal sehingga pajak pelaku penyelundupan tidak dikenakan biaya pajak.

Penyelundupan ini berdampak pada perdamaian kawasan, konsevasi hewan dan lingkungan. Sehingga perlu bagi keduanya melakukan kerjasama guna menyelesaikan persoalan ini. India dan Tiongkok perlu terlibat karena dampak yang diakibatkan tidak hanya dalam satu negara saja, melainkan menyebar ke negara lain khususnya negara yang berbatasan langsung.

Selain persoalan perbatasan, permasalahan keamanan yang dihadapi keduanya adalah terorisme. Penyebaran terorisme berawal dari Timur Tengah menuju Asia Tenggara dan kemudian berkembang. Setelah berkembang ancaman terorisme ini menyebar ke wilayah Asia Selatan. Penyebaran terorisme ini melewati perbatasan.

Pasca merdeka dari Inggris pada 1947, India menghadapi permasalahan baru yakni kekacauan dan tindakan kekerasan yang ditimbulkan oleh Pakistan Sejak saat itu, India menghadapi masalah terorisme yang kemudian menjadi masalah yang serius dan India menjadi negara target utama dari para kelompok militant Islam (Surya P.Sharma). Hal ini terjadi karena India berada di wilayah yang dikelilingi negara-negara yang menjadi tempat berkembangnya kelompok-kelompok terorisme. Pakistan dan Afganistan merupakan negara tempat berkembangnya kelompok islamis militant yang dengan mudah menyebar ke India melewati perbatasan. India berada pada posisi keempat setelah Irak, Afganistan dan Pakistan sebagai negara yang menjadi korban penyerangan terorisme. Kedekatan wilayah yang menjadi alasan secara geografis mengapa India menjadi korban yang serius dalam hal terorisme ini. Kedekatan ini yang menjadikan India dengan mudah menjadi sasaran bagi tindakan kelompok terorisme ini.

Pemerintah India melakukan pendekatan secara politik yakni soft strategy untuk mencegah perkembangan dan tindakan kelompok terorisme yang dapat mengancam masyarakat banyak. India menolak untuk menggunakan kekuatan militer untuk melawan tindakan terorisme. Hal ini dilihat karena apabila upaya dalam menggunakan militer diterapkan maka akan meningkatkan tindakan terorisme dalam mengancam masyarakat.

India dan Tiongkok menghadapi permasalahan lain di perbatasan. Namun persoalan ini muncul di wilayah perairan Samudera Hindia. Salah satu perompak tersebut berasal Sri Lanka, dimana target perompak ini adalah kapal India yang sedang beroperasi di Samudera Hindia. Dalam menghadapi persoalan ini maka India dan Tiongkok melakukan kerjasama. Namun, keduanya melakukan kerjasama dalam kerangka menghadapi persoalan perompakan. Persoalan ini kemudian menjadi alasan India untuk mencari cara dalam mengatasi persoalan ini. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal ini

terbukti pada April 2009, angkatan laut India melakukan kerjasama dengan angkatan laut Tiongkok. Pasukan angkatan laut Tiongkok kemudian melakukan operasi di sepanjang Samudera Hindia dalam mengatasi perompak tersebut. 109 Wilayah perairan memungkinkan kedua negara untuk melakukan operasi perairan guna memantau dan mengawasi wilayah perairan. Kemudian pada tahun 2012, India, Tiongkok dan Jepang melakukan kerjasama kordinasi di Teluk Eden. Kordinasi tersebut akan dilakukan dengan aktivitas operasi dan usaha perlindungan di wilayah perairan. Wilayah Teluk Eden menjadi tempat yang digunakan perompak, sehingga perl dilakukan pengawasan di teluk ini.

B. Kerjasama Pertahanan India Tiongkok

Pasca konflik 1962, India dan Tiongkok melakukan pertemuan guna membahas lebih lanjut persoalan perbatasan. Hal ini dilakukan karena status perbatasan pasca konflik adalah berada dalam status quo. Denga begitu, perlu bagi keduanya untuk melakukan perundingan lebih lanjut terkait persoalan ini. Perundingan yang dilakukan India dan Tiongkok kemudian dituangkan ke dalam bentuk kerjasama keamanan dengan dasar dibentuknya perjanjian keamanan. Hingga tahun 2013, keduanya menyepakati perjanjian sebanyak lima kali.

B.1. The Agreement on Maintaining Peace and Tranquility in the Boorder Area aling the Line Actual Control, 1993

Maintaining Peace and Tranquility in the Border Areas aling the Line Actual Control atau Perjanjian untuk Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Disepanjang Garis Pengawasan pada 7 September 1993. Perjanjian ini dibuat sebagai bentuk pemeliharaan perdamaian di sepanjang LAC serta bertujuan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan Five Principle. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Lima Prinsip ini berisi bahwa kedua negara untuk saling menghormati kedaulatan dan batas negara, tidak saling menyerang, tidak saling ikut mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seimbang dan saling menguntungkan, serta melaksanakan perdamaian.

Perjanjian ini berisi sembilan pasal atau artikel dan pada intinya membahas mengenai penyelesaian persoalan perbatasan India dan Tiongkok dengan cara damai dan keduanya tidak diijinkan untuk menggunakan kekuatan yang mengancam masing-masing pihak. Keduanya perlu memperhatikan batas LAC sehingga aktivitas yang dilakukan salah satau atau keduanya tidak diijinkan untuk melewati LAC atau garis pengawasan.

Kemudian, Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan kedua negara untuk mengurangi kekuatan militer di sepanjang garis control atau LAC sehingga kedunya perlu membatasi dalam penggunaan kekuatan militer di sekitar LAC demi menciptakan hubungan yang damai sebagai negara yang berbatasan. Pembatasan penggunaan kekuatan militer ini dilakukan guna menghindari kekuatan yang dapat menyebabkan peningkatan tensi di sepanjang perbatasan.

Dalam penggunaan kekuatan militer, masing-masing pihak perlu dilakukannya pemberitahuan terlebih dahulu. Jika muncul permasalahan mengenai perbatasan di sepanjang LAC, maka keduanya perlu melakukan konsultasi dan pertemuan secara damai. Meskipun menggunakan jalur udara, kedua negara perlu memastikan jalur yang digunakan melewati LAC dan kedua negara perlu untuk saling konsultasi mengenai penggunaan jalur udara. Isi perjanjian ini pada dasarnya untuk menghindari kembali terjadi konflik di perbatasan.

Sehingga kedua negara perlu mengambil sikap dalam pencegahan tersebut.

Dengan begitu keduanya perlu menghormati batas masing-masing negara yang dengan adanya pengawasan dari masing-masing atau disebut sebagai *Line Actual Control* (LAC). Kedua negara ini tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas yang melewati garis perbatasan di sepanjang LAC. Aktivitas ini dapat saja berupa kegiatan penggunaan kekuatan militer ataupun hanya sebatas pada latihan militer saja.

B.2. The Agreement on Confidence-Building Measures in Military Fields along the Line of Actual Control in the India-Tiongkok Border, 1996

Perjanjian selanjutnya dibuat pada tahun 1996 yang ditandatangani pada 29 November. Perjanjian ini membahas tentang membangun rasa saling percaya dalam penggunaan kekuatan militer disepanjang Garis Pengawasan (LAC). Pada dasarnya perjanjian ini dibuat untuk menjelaskan perjanjian tahun 1993 ke dalam hal-hal yang lebih spesifik. Perjanjian pada 1996 pun dibuat sebagai bentuk penegasan kembali perjanjian tahun 1993. Perjanjian ini disetujui ketika kunjungan presiden Tiongkok Jiyang Zemin ke India (Monika Chansoria, 2012).

B.4. Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Tiongkok on Modalities for the Implementation of Confidence Building Measures in the Military Field along the Line of Actual Control in the India-Tiongkok Border Areas, 2005

Motivasi untuk melakukan kerjasama pertahanan semakin ditegaskan dengan ditandatanganinya perjanjian pada 11 April 2005, yang membahas mengenai protokol yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan pelaksanaan CBM di sekitar wilayah yang disengketakan. Protokol ini dibuat dengan tujuan untuk menguraikan ketentuan yang terdapat pada perjanjian 1996 dengan menjelaskan secara rinci perjanjian yang disepakati India dan Tiongkok.

Protokol ini dibuat dalam tujuh pasal atau artikel dimana terdapat beberapa artikel perjanjian tahun 1996 dijelaskan secara lebih spesifik. Protokol ini dibuat dan ditandatangani setelah adanya dorongan dari PM Tiongkok Wen Jiabao dalam kunjungannya ke India pada April 2005 (Rup Narayan Das, 2010). Protokol ini dibuat untuk menjelaskan dan menegaskan perjanjian yang dibuat pada tahun 1996.

Dalam pencegahan terjadinya serangan dan larangan untuk menggunakan perlengkapan udara sejauh 10 KM ddari LAC seperti yang terdapat pada artikel 5 (lima) pada tahun 1996. Pada tahun 2005 dijelaskan bahwa apabila terjadinya serangan udara maka kedua negara perlu adanya pertemuan untuk mencari klarifikasi. Apabila kedua negara telah melakukan aktivitas udara melewati jarak kontrol maka perlu adanya pemberitahuan kepada pihak lain serta dilakukan secara aman tidak mengganggu pihak lain.

B.5. Indo-Tiongkok Border Defence Cooperation Agreement, 2013

Perjanjian pertahanan ini berasal dari visi kepala negara India dan Tiongkok untuk melakukan berbagai mekanisme dan dialog serta pertemuan terkait persoalan global. Dalam pertemuan yang berlangsung hal yang di bahas adalah berkaitan dengan tujuan dan kepentingan negara (Singapura: ISAS, 2013). Tujuan dan kepentingan kedua negara kemudian

di buat dalam kerangka kerjasama.

Kepentingan nasional kedua negara terkait perbatasan adalah dengan mencapai keamanan dan perdamaian di perbatasan yang merupakan tujuan dasar masyarakat di kedua negara. Kepentingan ini yang menjadi dasar kedua negara untuk melakukan kerjasama pertahanan di perbatasan.

Gagasan untuk melakukan kerjasama pertahanan ini diawali oleh Tiongkok. Hal ini dipicu oleh adanya kecurigaan India terhadap Tiongkok yang mengembangkan kekuatan militernya di perbatasan. Kecurigaan ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi tensi yang kemudian akan memunculkan konflik kembali. Sehingga perlu bagi Tiongkok untuk mengatasi kecurigaan ini.

Tujuan gagasan perjanjian ini adalah demi menciptakan stabilitas di perbatasan maka pada 4 Maret 2013 Tiongkok mengajukan untuk diadakannya kerjasama pertahanan di perbatasan India dan Tiongkok pada tahun 2013. Meskipun pada awalnya India ragu untuk menerima kerjasama ini, yakni karena adanya insiden yang terjadi pada April-Mei 2013, dimana serangan bom kedua pihak terjadi selama beberapa minggu. Peristiwa ini terjadi di Depsang, Ladakh. Peristiwa terjadi ketika tentara Tiongkok atau PLA mendirikan tiga tenda pada 15 April 2013 di dalam wilayah klaim India yakni di Raki Nala, Depsang. Pendirian tenda ini kemudian diketahui Indo-Tibetan Border Police (ITBP) atau polisi perbatasan India dan Tibet yang kemudian mengusir mundur pasukan Tiongkok dari Raki Nala, Depsang.

Tidak hanya itu, pada 27 April 2013, polisi perbatasan India-Tibet kemudian menemukan empat tenda yang di bangun pasukan Tiongkok sebagai basis administrasi sementara. Basis sementara ini menyediakan kebutuhan logistik pasukan yang melakukan pengawasan di perbatasan India-Tiongkok. Pembangunan tenda yang dilakukan Tiongkok ini menimbulkan keraguan bagi India untuk melakukan perundingan terkait persoalan perbatasan.

Namun, India kemudian menerima ajakan kerjasama ini ketika melakukan kunjungan pada 23 Oktober 2013 ke Beijing. Kemudian kedua pihak menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan Perbatasan (BDCA) dan kemudian pada 23 Oktober 2013. Perjanjian Kerjasama ini merupakan rangkaian CBM kelima, dimana perjanjian sebelumnya adalah pada tahun 1993, 1996, 2005, dan 2012. Kerjasama pertahanan ini merupakan langkah lanjutan dari perjanjian sebelumnya. Meskipun status perbatasan masih status quo, namun keduanya berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama demi tercapainya keamanan dan perdamaian di perbatasan.

Tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama pertahanan di perbatasan atau BDCA ini adalah untuk memperluas hubungan dan meresmikan aturan dalam melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya ketegangan diantara keduanya. Persoalan perbatasan India dan Tiongkok menjadi persoalan yang sensitif, sehingga sangat mudah bagi keduanya untuk menimbulkan konflik. Dengan begitu perlu upaya untuk mencegah hal-hal yang dapat menjadi akar permasalahan.

Prinsip yang termuat dalam perjanjian ini berasal dari CBM India dan Tiongkok dalam perjanjian pada tahun 1993 dan 1996, kedua perjanjian ini membahas kebijakan dan prosedur dalam memelihara perdamaian dan keamanan di sepanjang LAC. Selain dijadikan sebagai dasar, prinsip ini pun membuat India dan Tiongkok untuk menerima doktrin saling dan keamanan yang sama atau mutual and equal security. Doktrin mengenai keamanan dimana keduanya saling mewujudkan dan menaapatkan keamanan yang sama diterapkan baik dalam perjanjian terbaru maupun dalam perjanjian yang terdahulu. Doktrin ini memberikan dorongan

keduanya untuk mencegah terjadinya perang di perbatasan.

Berdasarkan BDCA, kedua negara tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan militer untuk melawan masing-masing. Kemudian, masing-masing kekuatan militer yang dimiliki tidak diperbolehkan untuk menyerang masing-masing, India dan Tiongkok. Dalam BDCA, India dan Tiongkok sepakat untuk tidak menggunakan ancaman dalam melawan masing-masing dengan maksud apapun ataupun untuk mencari kekuatan tunggal. Kemudian, dalam BDCA ini kedua negara bertanggung jawab untuk menangani masalah non-militer seperti bencana alam.

Prosedur yang terdapat dalam BDCA diantaranya adalah pertemuan yang dilakukan secara berkala. Pertemuan ini dimulai pada level atau tingkat komandan yang bertugas di sepanjang LAC dan pada tingkat tinggi dilakukan oleh lembaga yang berkaitan dengan militer. Hal ini sesuai dengan butir pasal IV yang tercantum dalam isi perjanjian BDCA pada tahun 2013. Pasal tersebut berisi tentang pembangunan tempat disemua wilayah sengketa yang berfungsi sebagai tempat untuk dilakukannya pertemuan antara pasukan di perbatasan dan penggunaan fasilitas telepon antara kedua pihak dalam berbagai tingkat di sepanjang LAC.

KESIMPULAN

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama pertahanan India dan Tiongkok terkait persoalan perbatasan dibuat atas dasar kepentingan kedua negara. Pada dasarnya kepentingan kedua negara adalah demi mencapai keamanan dan perdamaian di perbatasan. Tujuan ini kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian pertahanan India dan Tiongkok.

Dengan kerjasama pertahanan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mencegah persoalan yang timbul di perbatasan. Kemudian juga dapat digunakan solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di perbatasan. Selain tujuan atau kepentingan keamanan dan perdamaian, India memiliki kepentingan terkait memerangi penyelundupan atau smuggling, terorisme dan perompak di Samudera Hindia. Hal ini penting karena persoalan-persoalan ini akan mengganggu stabilitas kawasan khususnya India. Penulis melihat kerjasama pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013, sebagai kerangka kedua negara untuk mengatasi persoalan yang muncul di wilayah perbatasan yang dapat mengancam keamanan kedua negara. Pencapaian keamanan ini berkaitan dengan persoalan lain yang muncul di perbatasan. Maka, kerjasama ini pun berlaku pada persoalan lain yang muncul di sekitar perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo D. Abitbol, *Cause of the 1962 Sino-Indian War: A System Level Approach*. (University of Denver)
- Alfred P. Rubin, *The Sino-Indian Border Disputes*. (Columbia University : Research Student in International Law, 1960)
- Foreign Ministry of the People's Republic of China, *Joint Statement – A Vision for Future Development of China-India Strategic and Cooperative Partnership 2013/10/23*,

- http://www.fmprc.gov.cn/en_g/zxxx/t1092256.shtml dalam P.S Suryanarayana, *A New Way to Managae Old Dispute*, (Singapura: ISAS, 2013)
- Moleong, Lexy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015) hal. 5
- Monika Chansoria, *India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen Bilateral Confidence Building Measures*, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012)
- Navile Maxwell, *Sino-Indian Border Dispute Reconsidered*. (Economic and Political Weekly : 1999)
- Poltak Partogi Nainggolan, *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)
- Robert Jackson dan George Sorensen, “*Pengantar Studi Hubungan Internasional*, vol.5”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 137.
- Rup Narayan Das, *India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement*. (New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analysises, 2010)
- Shreesh K.Pathak, *India’s Border and Cross-Border Issues: Problems and Prospect*, (New Delhi: Centre for South Asian Studies)
- Srinath Raghavan, *Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of Asia:China, India, and The Emerging Global Order()*
- Surya P.Sharma, *The India-Chia Border Dispute: An Indian Perspective*.
- Swaminathan Natarajan, “Konflik Militer China-India: Ada apa di balik bentrokan militer antara India dan China?”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53074107>
- Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, *Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence (Panchsheel) in Post Cold War Era*, *Asian Journal of Multidisciplinary Studies* 2 (Mei 2014)
- Yaacov Vertzberger, *India’s Border Conflict with Tiongkok: A Perpectual Analysis*. *Journal of Contemporary History* (London and Beverly Hills:,SAGE,1982)
- Yulius P. Hermawan, “*Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) 43.